

## Hiperrealitas Media Pada Pemilihan Umum Indonesia Tahun 2019

Welly Wirman; Genny Gustina Sari

Ilmu Komunikasi, Universitas Riau

[welly.wirman@lecturer.unri.ac.id](mailto:welly.wirman@lecturer.unri.ac.id), [genny.gustina@lecturer.unri.ac.id](mailto:genny.gustina@lecturer.unri.ac.id)

Diterima 12 Februari 2020 / Disetujui 4 Mei 2020

### ABSTRACT

*Indonesia's General Election (Election) in 2019 could be the election that has the most attention. In 2014, Prabowo Subianto and Joko Widodo had also faced a presidential election which was won by Joko Widodo's 53.15% of the votes. This election in 2019 was marred by the news, starting from the debates of each pair of candidates, the debates of the supporters, the different calculation results at each survey institute. Each candidate claims his side's victory, the media shows openly alignments. This causes noise everywhere, people are confused, here hyperealities occur wherein it is a falsehood that mingles with reality; the past mingles with the present; facts diverge with engineering; the sign merges with reality; lying together with truth. The categories of truth, falsehood, authenticity, issues and reality are no longer valid in such a world. By using the literature study method, the writer tries to analyze the picture of media hypereality in the 2019 election case. The object of this research is printed and online documents. The results showed that the 2019 election was the worst election with very high media hyperelicity. Fraud is broadcast in a real way where each party feels right with the data engineered. People inevitably are forced to accept, consume and construct the information themselves. Media hyperness in the 2019 elections has the potential to damage national unity.*

**Keywords :** Election 2019; Hyperealitas; Media; Reality

### ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) Indonesia tahun 2019 bisa jadi merupakan pemilu yang paling banyak menyita perhatian publik. Pada tahun 2014 silam, Prabowo Subianto dan Joko Widodo juga telah berhadapan dalam pemilihan presiden yang dimenangkan oleh pihak Joko Widodo sebesar 53.15 % suara. Pemilu tahun 2019 kali ini diwarnai carut marut pemberitaan, mulai dari debat masing-masing pasangan calon, debat para pendukung, hasil hitung yang berbeda pada masing-masing lembaga survey. Masing-masing calon mengklaim kemenangan pihaknya, media menunjukkan keberpihakan secara terang-terangan. Hal ini menimbulkan kegaduhan dimana-mana, masyarakat dibuat bingung, disini terjadi hiperealitas dimana yang di dalamnya merupakan sebuah kepalsuan yang berbaur dengan kenyataan; masa lalu berbaur dengan masa kini; fakta bersimpang siur dengan rekayasa; tanda melebur dengan realitas; dusta bersenyawa dengan kebenaran. Kategori kebenaran, kepalsuan, keaslian, isu-isu, dan realitas seakan-akan tidak berlaku lagi didalam dunia seperti itu. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penulis mencoba menganalisis gambaran hiperealitas media dalam kasus pemilu 2019. Objek penelitian ini adalah dokumen cetak dan online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilu 2019 merupakan pemilu terparah dengan hiperelitas media yang sangat tinggi. Kecurangan disiarkan secara nyata dimana masing-masing pihak merasa benar dengan data yang direkayasa. Masyarakat mau tidak mau dipaksa menerima, mengkonsumsi dan mengkonstruksi sendiri informasi yang diterima. Hiperealitas media pada pemilu 2019 sangat berpotensi merusak kesatuan bangsa.

**Kata Kunci :** Hiperealitas; Media; Pemilu 2019; Realitas

## PENDAHULUAN

17 April 2019, Indonesia melaksanakan event akbar yang telah dinanti oleh seluruh masyarakatnya. Pemilihan umum (PEMILU) serentak dilaksanakan dalam rangka memilih presiden dan wakil presiden serta para elit politik yang nantinya akan mengapresiasi suara rakyat. Sebagai Negara demokrasi, Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi dengan begitu banyaknya keberagaman budaya dan nilai yang dianut ditambah lagi Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia (222 juta pada tahun 2016)<sup>1</sup> hidup berdampingan dengan agama-agama lainnya menjadikan kondisi sosial masyarakat Indonesia sangat bewarna.

Perhatian publik tertuju sepenuhnya pada pemilihan presiden Republik Indonesia. Kedua calon presiden yang berkompetisi bukanlah wajah baru, pada tahun 2014 silam Joko Widodo menang dari pesaingnya Prabowo Subianto. Berdasarkan penghitungan suara yang dikumpulkan di 33 provinsi, Jokowi-Kalla mendapatkan 53,15% atau 70.633.576 suara. Pesaing mereka, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 46,85% atau 62.262.844 suara, yang membuat Jokowi unggul 8.370.732 suara atas Prabowo. KPU menyatakan jumlah suara sah sebanyak 132.896.438 suara.<sup>2</sup>

Lalu bagaimana pemilu yang dilaksanakan tahun 2019 ini? dalam sejarah Negara Republik Indonesia, baru kali ini terlihat antusiasme masyarakat Indonesia yang begitu besar hal ini terbukti dari jumlah pemilih sebesar 192.828.520 pemilih baik di dalam serta luar negeri.<sup>3</sup> Jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2014, terdapat peningkatan sebesar 59.932.082 pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap masa depan bangsa semakin besar. Harapan dan keinginan masyarakat untuk perubahan dan perbaikan kehidupan menjadi faktor pendorong tingginya minat dan perhatian masyarakat.

Tidak membutuhkan waktu lama, perkembangan teknologi komunikasi memudahkan masyarakat di Indonesia dalam melihat, memantau dan mendapatkan informasi seputar hasil perhitungan suara di berbagai daerah di Indonesia. Di berbagai media sosial, masyarakat mengunduh hasil perhitungan suara di daerah mereka masing-masing. Dari pengamatan peneliti (18-20 April 2019) melalui beberapa unggahan masyarakat mengenai hasil perhitungan suara sementara dimenangkan oleh Prabowo – Sandi. Di pihak lain, televisi menayangkan hasil perhitungan suara sementara dari beberapa lembaga survey melalui *quick*

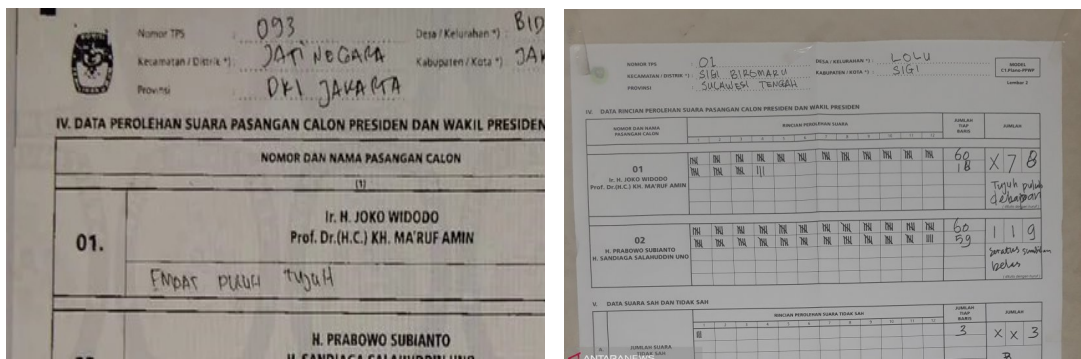
---

<sup>1</sup> <https://support.muslimpro.com/hc/id/articles/115002006087-Top-10-Populasi-Umat-Muslim-Terbesar-di-Dunia>

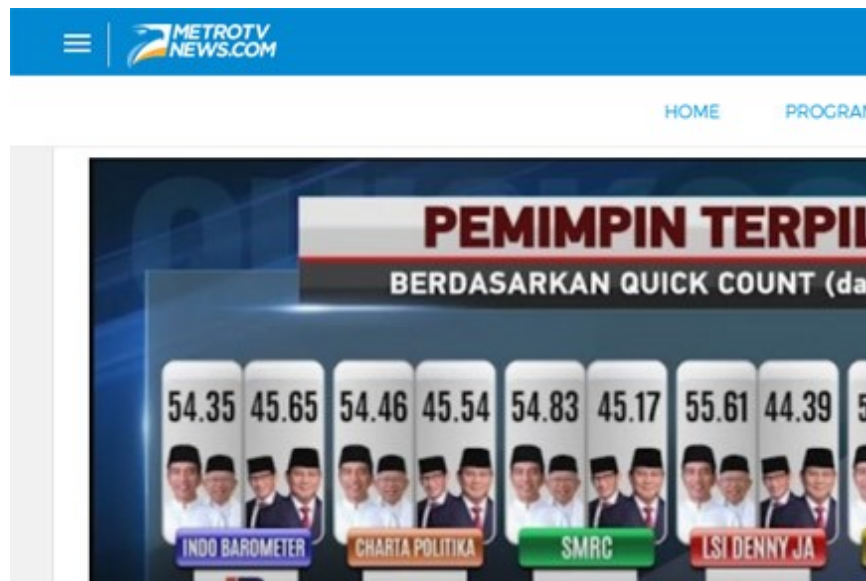
<sup>2</sup> [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/07/140722\\_kpu\\_hasil\\_pilpres](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140722_kpu_hasil_pilpres)

<sup>3</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181215171713-32-353929/kpu-jumlah-pemilih-tetap-pemilu-2019-capai-192-juta>

count dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Anehnya, hasil perhitungan lembaga survey menunjukkan kemenangan sementara pada kubu Jokowi-Ma'ruf berbanding terbalik dengan perhitungan di lapangan. Masyarakat dibuat kebingungan, media sosial ramai menyuarakan adanya kecurangan. Lembaga survey tetap pada pendirian dengan dalih teknologi yang mereka kuasai, masyarakat tidak mau kalah dengan data-data dan bukti di tangan. Indonesia darurat kejujuran.



Gambar 1. Contoh beberapa Form C1 yang diunggah masyarakat melalui media sosial



Gambar 2. Hasil *Quick Count* Beberapa Lembaga Survey di Televisi

Perbedaan hasil perhitungan suara di lapangan dengan hasil *quick count* beberapa lembaga survey mengindikasikan terjadinya kecurangan-kecurangan di lapangan. Masyarakat bereaksi, para pasangan calon presiden juga bereaksi, masing-masing mengklaim kemenangan berdasarkan lembaga dan metode perhitungan masing-masing. Demokrasi Negara Republik Indonesia sedang di uji. Objektivitas KPU (Komisi Pemilihan Umum) sedang diuji. Semua lapisan masyarakat menantikan, siapa yang benar, siapa yang salah dan di atas itu semua, siapa yang nanti keluar sebagai pemenangnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdinand Eskol Tiar Sirait dengan judul *Ujaran Kebencian, Hoax Dan Perilaku Memilih: (Studi Kasus Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia)* menyatakan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah di mana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variable anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara (Pusat, Ilmu, & Indonesia, n.d.)

Menurut Adhi (2013) dikatakan bahwa komunikasi politik memiliki fungsi yang sangat penting dan menentukan demokratisasi, dan terdapat pertarungan kepentingan untuk memengaruhi, merebut, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan yang dilakukan oleh para komunikator politik yaitu pihak elit (penguasa) maupun publik (yang dikuasai). Dari sinilah kita mengetahui bahwa komunikator dan komunikan harus memiliki keahlian komunikasi yang baik, hingga akhirnya konflik perpolitikan dapat diminimalisir dengan baik (Wakid & Sugandi, 2019).

Perang informasi antar media menjadikan masyarakat dan mata dunia kebingungan membedakan mana yang fakta mana yang opini, jika masing-masing pihak teguh dengan pendiriannya, lalu siapakah yang salah? Masalah-masalah baru bermunculan, kematian tiba-tiba 456 orang petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)<sup>4</sup> di beberapa daerah ditengarai sebagai upaya untuk membungkam kebenaran, namun lagi-lagi media televisi mengkonfirmasi penyebab kematian petugas KPPS adalah kelelahan. Masyarakat tidak lagi bisa membedakan mana yang realitas mana yang bukan. Hampir sebulan lamanya, hiperealitas media terjadi di Indonesia dan mungkin masih akan berlanjut.

Di dalam dunia hiperealitas, subjek sebagai konsumen digiring ke dalam pengalaman ruang *hyperreal* pengalaman silih bergantinya penampakan dalam ruang, berbaur dan meleburnya realitas dengan fantasi, fiksi, halusinasi dan nostalgia. Menurut Baudrillard (1985) terdapat beberapa tahap yang dilalui sebelum terciptanya hiperealitas, yaitu : *Counterfeit* merupakan pola yang dominan pada periode klasik dan image merupakan representasi dari realitas. *Production* adalah pola yang dominan dalam era industry, dimana pada tahap ini image menutupi realitas. *Simulation* adalah pola yang merajalela pada tahap sekarang yang dikontrol oleh kode dimana image menggantikan realitas yang lama menjadi

---

<sup>4</sup> <https://kumparan.com/@kumparannews/mengusut-penyebab-kematian-petugas-kpps-pemilu-2019-1r2h3epIMiW>

realitas yang baru. *Fractal* merupakan tahap *trans everything* yang mengubah secara radikal cara pandang kita terhadap dunia (Komala, 2018).

Media massa juga bisa dianggap menciptakan lingkungan semu tersendiri di antara manusia dan dunia “nyata” objektif. Anggapan ini mengandung implikasi penting terhadap pandangan tentang peran media di masyarakat. Media telah mempercepat, memperkuat dan melekatkan peran tradisional komunikasi sehingga bisa diartikan media menebalkan dunia semu sehingga menambah jarak antara manusia modern dengan dunia nyata. Di sisi lain sebagai institusi *control social* yang dominan, media bisa dinilai memperkuat nilai-nilai dan pandangan lama di suatu masyarakat dan bisa membuatnya stagnan. Media memang bisa memperkuat pola pikir dan perilaku lama sehingga menyulitkan masyarakat yang bersangkutan menapaki kemajuan (Hamid, 2016).

*Control social* oleh media massa begitu ekstensif dan efektif, sehingga sebagian pengamat menganggap kekuatan utama media memang di situ. Rekayasa kesadaran juga sudah ada sejak lama, namun media adalah yang memungkinkan hal itu dilaksanakan secara cepat dan besar-besaran. Media juga mengubah bentuk *control social*. Paul Lazarsfeld dan Robert K Merton juga melihat media dapat menghaluskan paksaan sehingga tampak sebagai bujukan. Mereka mengatakan “kelompok-kelompok kuat kian mengandalkan teknik manipulasi melalui media untuk mencapai apa yang diinginkannya, termasuk agar mereka bisa mengontrol secara lebih halus”. Media telah memainkan peran penting dalam merombak tatanan sosial menjadi masyarakat serba massal. Lebih dari itu, media juga kian penting sebagai alat kekuasaan kaum elit. Media tidak hanya menyaring pengalaman eksternal manusia, melainkan bahkan ikut membentuk pengalaman itu sendiri. Media menyajikan aneka informasi tentang dunia. Namun karena media menyajikannya dalam bahasa, *stereotype* dan harapannya sendiri, media sering membuat manusia frustrasi dalam upayanya mengaitkan kehidupan pribadinya dengan kenyataan dunia disekelilingnya. Kritik terhadap pers di masa lalu lebih sederhana ketimbang uraian Millis. Tuduhan yang sering dilontarkan adalah pers melakukan konspirasi dalam memberitakan sesuatu, terutama dalam kalangan bisnis, demi kepentingan mereka sendiri (Sohana Abdul Hamid, 2016), (Nashrullah, 2012), (Manovich, 2001).

Media massa mempunyai pengaruh yang kuat dalam politik dan konflik sosial secara politik dikarenakan media massa ikut mempengaruhi keputusan politik dengan memberikan atau tidak memberikan publikasi kepada penyelenggara kebijakan. Bukan hanya sekedar media massa, namun di era kecanggihan teknologi sekarang kita kenal dengan namanya new media. New media merupakan media yang berbasis teknologi internet yang bahkan

penyebaran informasinya lebih cepat dan dengan jangkauan yang luas. Pengaruh new media atau yang lebih disebut media sosial sangat berpengaruh terhadap membentuk opini dimasyarakat.

Hiperrealitas media menurut Jean Baudrillard (Bungin & Burhan, 2009), adalah perikayasaan media yang melebih-lebihkan sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan realitas yang ada untuk memancing respon masyarakat. Hiperrealitas media diperkenalkan oleh Jean Baudrillard untuk menjelaskan perikayasaan ( dalam pengertian distorsi ). Dalam wacana *postmedia* yakni adanya sembiosis antara realitas dan fantasi media, hiperrealitas media diyakini berkembang ketika media dikendalikan oleh dua kekuatan utama yakni kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Objektivitas, kebenaran, keadilan dan makna sebagai kepentingan publik lalu dikalahkan oleh subjektivitas, kesemuan, dan permainan bahasa (*language game*). Media massa boleh jadi mencoba untuk merepresentasikan peristiwa – peristiwa secara objektif, jujur, adil, transparan akan tetapi, berbagai bentuk tekanan dan kepentingan ideologis telah menyebabkan media terperangkap ke dalam politisasi media dan hiperrealitas media yang tidak menguntungkan publik (Fitria, 2016), (Komala, 2018).

Hiperrealitas menciptakan satu kondisi dimana yang di dalamnya merupakan sebuah kepalsuan yang berbaur dengan kenyataan; masa lalu berbaur dengan masa kini; fakta bersimpang siur dengan rekayasa; tanda melebur dengan realitas; dusta bersenyawa dengan kebenaran. Kategori kebenaran, kepalsuan, keaslian, isu-isu, dan realitas seakan-akan tidak berlaku lagi didalam dunia seperti itu (Komala, 2018). Atau secara gampang nya dapat disimpulkan bahwasanya hiperrealitas media merupakan sebuah realita baru, yang diciptakan berkat peran ‘media’ menyangkan atau memperlihatkan sesuatu, dimana hal ini mengakibatkan masyarakat mempercayai realita baru tersebut, tanpa mengetahui realita ‘asli’ dari apa yang mereka percayai. Realita baru yang dibicarakan merupakan realita yang diciptakan oleh masyarakat sendiri, setelah menyaksikan apa yang disajikan oleh media tadi. Dimana, bisa dikatakan realita baru tersebut merupakan opini masyarakat yang sudah terkristalkan, dan masyarakat pun berakhir dengan mempercayai realita baru, yang merupakan opini mereka sendiri, sebagai kebenaran atau kenyataan. Opini publik, menjadi realitas masyarakat, realitas menjadi sebuah kebohongan di dalam masyarakat (Bungin & Burhan, 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk hiperrealitas media dalam pemilu Indonesia 2019 berdasarkan pengamatan dari dokumen-dokumen cetak maupun online. Tanpa mendukung atau membenarkan salah satu pihak, tulisan ini mencoba melihat secara objektif kondisi pertukaran informasi di Indonesia terkait pemilu 2019 ini. Bagaimana

kondisi Indonesia bisa menjadi begitu memprihatinkan saat aturan-aturan dilanggar, kebenaran menjadi buram dan opini diangung-agungkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan penyajian analisis secara deskriptif. Penelitian kualitatif dipergunakan untuk menganalisa kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, peristiwa tertentu, pergerakan sosial dan sebagainya (Sugiyono, 2012), (Lexy J. Moleong, 2019). Menurut (Creswell, 2007), penelitian kualitatif berupaya mengkonstruksi realitas sosial, berfokus pada proses interpretasi dan peristiwa, kunci utamanya terletak pada keaslian, tidak bebas nilai, terikat pada fenomena dan situasi yang diamati, bersifat analisis tematik serta melibatkan peneliti di dalamnya. Sementara itu, studi kepustakaan dipandang sebagai alat pengumpulan data yang berkaitan dengan topik yang diamati melalui buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan dan ketetapan, sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik (Setiawan, 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Masyarakat sedang dilanda kebingungan. Pemilihan umum yang sejatinya haruslah jujur dan adil ternyata sarat kecurangan. Namun yang membuat masyarakat semakin bingung adalah siapa pelaku kecurangan tersebut?. Adanya upaya-upaya dari kedua belah kubu yang bersaing untuk menduduki kursi presiden memecah suara masyarakat. Di satu sisi, kita bisa melihat bagaimana kualitas demokrasi di Indonesia mulai memasuki babak baru yang lebih berkualitas. Namun tidak bisa dipungkiri disisi lain mau tidak mau kita harus mengakui bahwa dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia, pemilu tahun 2019 kali ini bisa memicu kericuhan massal yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perang opini di media massa menjadi konsumsi masyarakat beberapa hari belakangan usai pemilu dilaksanakan. Kehadiran new media menjadi jalan bagi masyarakat melontarkan opini, mengklarifikasi data bahkan menghujat pemimpin. Kekacauan massif ini jika tidak segera diatasi akan menimbulkan kekacauan yang lebih parah. *People power* digadagadag akan terlaksana jika KPU (Komisi Pemilihan Umum) terbukti tidak bisa netral dan menjembatani kemenangan yang di klaim oleh masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut.

Bukan hanya masyarakat, di sisi lain para ulama dan pemuka agama turun tangan menyerukan hal-hal yang dianggap benar. Dan tentu saja kita belum lupa kekuatan masyarakat pada peristiwa 411 dan 212 yang terjadi tahun lalu akibat dugaan pelecehan agama Islam oleh Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pada masa itu. Ulama mengumpulkan, menyerukan gerakan aksi damai menuntut keadilan yang berujung dipenjaranya Ahok selama 2 tahun. Pada babak ini, mayoritas umat Islam di Indonesia menunjukkan kekuatan persatuan mereka.

Terkait kasus yang kemudian muncul kepermukaan akibat adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu dan perhitungan suara oleh beberapa lembaga survey serta keberpihakan pihak-pihak yang seharusnya netral menengahi ini semua bukan tidak mungkin memancing kemarahan masyarakat. Adanya dua kubu yang sama-sama kuat mewakili pasangan calon yang mereka dukung ditambah kekuatan ulama dalam mengumpulkan massa bisa jadi bola api yang siap menghancurkan kedaulatan bangsa.

Masyarakat masih menunggu itikad baik pemerintah dan KPU. Mereka ingin suara mereka tidak lagi dimanipulasi, mereka ingin turut serta mengawasi, menikmati pesta demokrasi tanpa indikasi kecurangan disana sini hanya untuk memajukan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dan akhirnya, semoga saja kepercayaan masyarakat terhadap media di Indonesia bisa kembali terbentuk. Media-media yang ada sebagai gerbang informasi yang bisa menyampaikan kebenaran dan transparansi informasi bagi masyarakat.

Hiperrealitas media yang terbentuk mampu membuat masyarakat dilanda kebingungan. Cara-cara yang penulis lihat tidak cukup halus bisa jadi penyebab luntarnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan khususnya KPU sebagai penyelenggara pemilu 2019. Keberpihakan media begitu nyata dan realitas yang diciptakan mencampur kebenaran dan kesalahan membuat masyarakat berada dalam pusaran kebingungan antara fakta dan opini. Media mengkonstruksi sebuah realitas baru melalui informasi yang disampaikan dikuatkan dengan legalitas pemerintah membuat suara-suara selain suara pemerintahan terasa sumbang.

## **Pembahasan**

Penulis melihat begitu banyak ujaran kebencian yang muncul akibat realitas yang dibentuk media, himbuan untuk mematikan televisi dan beralih pada informasi yang tersebar di media-media sosial seperti Instagram dan Facebook hingga adanya pemblokiran penggunaan media sosial membuat masyarakat semakin bertanya-tanya, ada apakah gerangan? Siapakah yang berkata benar dan siapa yang berdusta? Siapa yang bisa dipercaya?. Hiperrealitas media dalam pemberitaan Pemilu 2019 di Indonesia telah berhasil mencapai



tujuannya, menciptakan ketidakjelasan dalam sebuah realita dan membangun realita baru yang menggiring khalayak untuk mau tidak mau percaya dengan informasi yang disajikan.

Dalam penelitiannya, Chastiti Mediafra Wulolo dan Edward Semeuel yang berjudul *Meredam Konflik Dalam Pusaran Siber Dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019* menyatakan bahwa konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepenting (Pusat et al., n.d.).

Informasi yang tersebar selama pelaksanaan pemilu 2019 tidak bisa dipungkiri sarat dengan kesimpangsiuran. Tumpang tindih informasi yang diterima masyarakat telah menggaburkan realitas itu sendiri. Pada akhirnya, masyarakat sebagian besar merasa muak dan jenuh dengan pemberitaan yang ada. Apa yang dibutuhkan selanjutnya adalah reformasi secara besar-besaran dalam sistem perwakilan partai, sistem pemilihan dan pengaturan teknis pemilu yang lebih efektif (Solihah, 2018). Penulis menilai pemilu secara serentak belum tepat dilaksanakan di Indonesia. Kita harus belajar dari pengalaman pemilu tahun 2019 ini. Bagaimanapun juga, suara rakyat merupakan suara penentu nasib bangsa kedepannya. Terlepas dari ada atau tidaknya kecurangan, namun selayaknya lembaga KPU mampu menwadahi aspirasi masyarakat bukan malah terkesan memihak dan berbalik menjadi musuh masyarakat. Siapapun yang nantinya memimpin bangsa sebaiknya menjadi panutan, memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan membawa Negara Indonesia menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

## SIMPULAN

Hiperealitas pada pemilu 2019 merupakan catatan kelam bangsa Indonesia khususnya dalam sudut pandang objektivitas media massa. Realitas semu yang dicampur adukkan dengan kenyataan menciptakan realitas baru yang secara tidak langsung dipaksakan untuk dikonsumsi masyarakat. Integritas bangsa dan pemimpin Negara dipertanyakan. Legalitas KPU sebagai lembaga yang dituntut independen dalam menyelenggarakan pemilu nyatanya telah rusak. Masyarakat saling berbenturan di dalam realitas yang tercipta. Pemerintah haruslah segera berbenah. Tidak masanya lagi kita berbicara siapa yang benar siapa yang

salah, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kepentingan masyarakat sedang dipertaruhkan, nama baik Indonesia sebagai Negara demokrasi sedang dipertontonkan. Hiperrealitas seperti ini tidak lagi boleh terjadi pada masa-masa yang akan datang. Sistem demokrasi Indonesia harus dikembalikan ke posisi idealnya agar perpecahan dan perang antar saudara sebangsa bisa dihindarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, & Burhan. (2009). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Kencana Prenada Media Group. <https://doi.org/10.1186/1758-5996-1-20>
- Creswell, J. W. (2007). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches. *SAGE Publications*, 203–223. <https://doi.org/10.4135/9781849208956>
- Fitria, H. (2016). Hiperrealitas dalam social media (studi kasus: makan cantik di senopati pada masyarakat perkotaan). *Informasi*, 45(2), 87. <https://doi.org/10.21831/informasi.v45i2.7985>
- Hamid, S. A. (2016). Pengaruh Media Massa Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat. *Journal of Social Sciences and Humanities*, (1), 214–226. Diambil dari <file:///C:/Users/Asus/Downloads/15599-43467-1-SM.pdf>
- Komala, E. (2018). Media Sosial Sebagai Sebuah Ruang Hiperrealitas. *LINIMASA: JURNAL ILMU KOMUNIKASI*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.23969/linimasa.v1i2.1077>
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). *PT. Remaja Rosda Karya*, 157. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Manovich, L. (2001). What is new media? *The New Media Theory Reader*, 5–10.
- Nashrullah, R. (2012). Internet dan Ruang Publik Virtual, Sebuah Refleksi atas Teori Ruang Publik Habermas. *Jurnal Komunikator*, 4, 26–35. Diambil dari <http://journal.umy.ac.id/index.php/jkm/article/view/188>
- Pusat, J., Ilmu, P. P., & Indonesia, P. (n.d.). *Jurnal Penelitian Politik Mitra Bestari Penanggung Jawab Pemimpin Redaksi Dewan Redaksi Redaksi Pelaksana Sekretaris Redaksi Produksi dan Sirkulasi*.
- Setiawan, S. (2017). Studi Kepustakaan. *Gurupendidikan.co.id*, 1. Diambil dari [gurupendidikan.co.id/Stud-Kepustakaan-Pengertian-Tujuan-Peranan-Sumber-Strategi/](http://gurupendidikan.co.id/Stud-Kepustakaan-Pengertian-Tujuan-Peranan-Sumber-Strategi/)

- Sohana Abdul Hamid. (2016). Pengaruh Media Massa Terhadap Masyarakat. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(1), 214–226. Diambil dari <http://pengaruhmediamassa.blogspot.my/>
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Wakid, S. F., & Sugandi, B. (2019). Pemilu 2019 dalam Pusaran Hoaks, Bukti Lemahnya Literasi Digital? *kompas*, hal. 1.
- Nugroho Bimo dan M. Yamin Panca Setia. 2015. *Jokowi People Power*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.  
[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/07/140722\\_kpu\\_hasil\\_pilpres](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140722_kpu_hasil_pilpres)  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181215171713-32-353929/kpu-jumlah-pemilih-tetap-pemilu-2019-capai-192-juta>  
<https://kumparan.com/@kumparannews/mengusut-penyebab-kematian-petugas-kpps-pemilu-2019-1r2h3epIMiW>  
<https://support.muslimpro.com/hc/id/articles/115002006087-Top-10-Populasi-Umat-Muslim-Terb Besar-di-Dunia>